

PENERAPAN KONSEP *PLUG IN CITY* DALAM PENATAAN PKL DI PUSAT BISNIS PURI INDAH, KEMBANGAN

Vincent Marthanegara¹⁾,Stephanus Huwae^{2*)}

¹⁾Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, vmarthanegara20@gmail.com

^{2*)}Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, ituthuwae@gmail.com

*Penulis Korespondensi: ituthuwae@gmail.com

Masuk: 14-06-2023, revisi: 23-09-2023, diterima untuk diterbitkan: 28-10-2023

Abstrak

Pedagang Kaki Lima di Jakarta yang melanggar peraturan kota seringkali miris karena hidup dalam kondisi sulit dan penuh tekanan. Mereka harus menghadapi berbagai risiko, termasuk ancaman dari penjahat dan pihak berwenang. Selain itu, pedagang kaki lima yang melanggar tatanan kota seringkali mengalami pendapatan yang minim dan tidak teratur. mereka tidak memiliki tunjangan dan hak sosial yang sama dengan pekerja tetap lainnya dan seringkali didiskriminasi dan diperlakukan dengan kasar oleh orang-orang yang tidak memahami situasi mereka. Kondisi kerja yang keras juga berdampak pada kesehatan fisik dan mental PKL. Mereka seringkali harus bekerja dalam kondisi cuaca ekstrim, lingkungan kotor dan tidak sehat, serta tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap penyakit dan stres yang mengancam kesehatan dan kualitas hidup mereka. Pendekatan konsep *Plug-in City* adalah salah satu metode desain pada bangunan yang bertujuan untuk menciptakan bangunan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan prinsip-prinsip desain yang lebih modern serta dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi energi, memaksimalkan pemanfaatan lahan, mengurangi dampak lingkungan, menciptakan ruang publik yang nyaman dan terbuka. Sarana Pedagang Kaki Lima dibagi menjadi tiga zona yaitu zona kuliner, zona busana dan *creative play* yang berupa instalasi melayang, sedangkan adanya fasilitas relaksasi menawarkan aktivitas untuk mengatasi kelelahan fisik dan mental, seperti; *City-view, Jogging Track dan Meditation Garden*.

Kata kunci: pedagang kaki lima; pelanggaran; *plug-in city*; rekreasi; relaksasi

Abstract

Street vendors in Jakarta who violate city regulations often feel sad because they live in difficult and stressful conditions. They must face various risks, including threats from criminals and the authorities. In addition, street vendors who violate urban order often experience minimal and irregular income. They do not have the same benefits and social rights as other regular workers and are often discriminated against and treated harshly by people who do not understand their situation. The harsh working conditions also took a toll on the physical and mental health of street vendors. They often have to work in extreme weather conditions, dirty and unhealthy environments, and don't have enough rest time. As a result, they are more susceptible to disease and stress that threaten their health and quality of life. The Plug-in City concept approach is a design method for buildings that aims to create buildings that are more sustainable and environmentally friendly by utilizing technology, innovation, and more modern design principles and with the hope of increasing energy efficiency, maximizing land use, reducing environmental impact, creating comfortable and open public spaces. The street vendor facilities are divided into three zones, namely the culinary zone, fashion zone and creative play in the form of a floating installation, while the relaxation facilities offer activities to overcome physical and mental fatigue, such as; City-view, Jogging Track and Meditation Garden.

Keywords: *plug-in city; recreation; relaxation; street vendors; violation*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

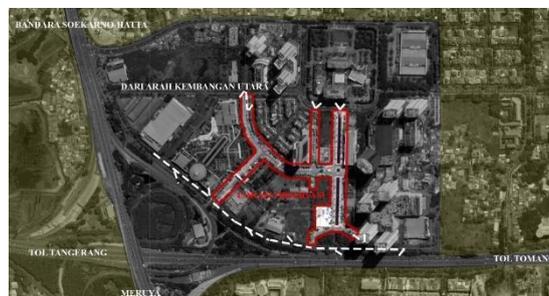
Pedagang kaki lima yang melanggar peraturan kota Jakarta seringkali sedih karena hidup dalam kondisi sulit dan penuh tekanan. Mereka menghadapi berbagai risiko, termasuk penumpasan oleh aparat keamanan, pengusuran paksa dari pos perdagangan, dan ancaman dari preman dan geng yang menguasai wilayah tersebut. Selain itu, PKL yang melanggar tata kota seringkali juga berurusan dengan pendapatan yang minim dan fluktuatif. Mereka tidak memiliki tunjangan dan hak sosial yang sama dengan pekerja tetap lainnya dan seringkali menghadapi diskriminasi dan perlakuan kasar dari orang-orang yang tidak memahami situasi mereka. Kondisi kerja yang sulit ini juga mempengaruhi kesehatan fisik dan mental PKL. Mereka seringkali harus bekerja dalam kondisi cuaca yang ekstrim, lingkungan yang kotor dan tidak sehat serta tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit dan stres, yang dapat mengancam kesehatan dan kualitas hidup mereka. Secara keseluruhan, nasib PKL Jakarta yang melanggar peraturan kota adalah akibat dari sistem sosial ekonomi yang timpang dan kurangnya upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, masalah ini perlu mendapat perhatian lebih, termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak pedagang kaki lima.



Gambar 1. Ilustrasi Mirisnya Berdagang Ekstrem oleh Pedagang Kaki Lima
Sumber: Olahan Penulis, 2023

Studi Kasus: Kawasan CBD Puri Indah, Kembangan Selatan, Jakarta Barat

Pedagang kaki lima di perkotaan, termasuk kawasan Kembangan di Jakarta Barat, kini berkembang pesat, baik fisik maupun non fisik, dan cenderung menimbulkan masalah lingkungan, tata ruang, dan sosial di perkotaan. Untuk mengamati dan menguji aktivitas pedagang kaki lima dan bangunan sekitarnya yang mendukung akses jalan menuju masyarakat, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode 'berkeliling kota' dan mengamati langsung ke lokasi objek yang akan diproduksi. Dari hasil, konfigurasi pemetaan digambarkan sebagai:



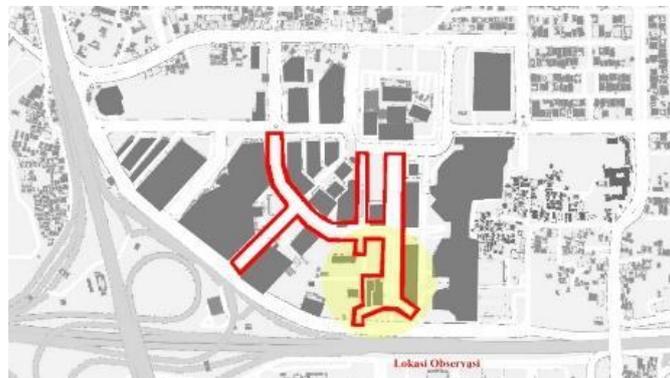
Gambar 2. Konfigurasi Lokasi Observasi (Kawasan CBD Puri Indah)
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Pada gambar peta diatas yang difokus garis merahkan merupakan lokasi dari maraknya penggelaran PKL pada area – area tersebut. Walaupun berlokasi di kawasan yang sudah maju, tidak menutup kemungkinan akan tingginya PKL yang bermunculan. Lalu adanya pemetaan dari

beberapa jenis aktivitas penjual, peta solid void bangunan sekitar, peta hirarki akses menuju lokasi observasi. Sebagai berikut;



Gambar 3. Peta Aktivitas PKL
Sumber: EZ MAP, 2023



Gambar 4. Peta Solid-Void Kawasan
Sumber: EZ MAP, 2023



Gambar 5. Peta Hirarki Jalan Kawasan
Sumber: EZ MAP, 2023

Berdasarkan data yang ditemukan, aktivitas pedagang kaki lima di kawasan pengamatan terlihat berubah dari waktu ke waktu. Dibagi menjadi tiga waktu (pagi: 07:00-11:00, siang: 12:00-16:00, siang: 17:00-18:00, malam: 19:00-22:00). Adanya perbedaan dapat dilihat pada konfigurasi kartu dan dokumen pribadi berikut ini.;



Gambar 6. Aktivitas PKL Pagi
Sumber: EZ MAP, 2023

Membuktikan bahwa efektifitas "Formal" berada pada jam efektif sedangkan efektifitas "Informal" seperti PKL berada aktif pada jam-jam sebaliknya. Dimana kekosongan dalam waktu formal ini dapat digantikan dengan waktu para pedagang informal.



Gambar 7. Aktivitas PKL Pagi
Sumber: EZ MAP, 2023

Tabel 1. Jam Operasional Kawasan CBD Puri Indah

JAM OPERASIONAL CBD PURI INDAH	A.M.				P.M.				A.M.			
	06.00	08.00	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	22.00	24.00	02.00	04.00
Mall												
kantor		●	●	●	●	●	●	●	●			
Ruko		●	●	●	●	●	●	●	●			
Bank		●	●	●	●	●	●	●	●			
SuperMarket		●	●	●	●	●	●	●	●			
Gedung Pemerintahan			●	●	●	●	●	●	●			
PKL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Intenstas Padat/Efektif
 ● Intenstas Sedang
 ● Intenstas Rendah

Sumber: Penulis, 2023

Rumusan Permasalahan

Karena kepadatan penduduk perkotaan yang tinggi dan angkatan kerja yang sangat tidak merata, banyak orang yang bekerja di sektor informal atau bekerja di bisnis seperti pedagang kaki lima di kota-kota besar Indonesia, termasuk daerah Kembangan Jakarta. Pesatnya pertumbuhan pedagang kaki lima telah menciptakan masalah baru: Masalah kemacetan dan sampah. (Detik.com, 4 Desember 2022). Dilihat dari aktivitas PKL di kawasan Kembangan, PKL tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Berdasarkan sarana fisik yang digunakan; Selalu berada pada area publik di sekitar pasar, seperti trotoar dan pinggir jalan; Bentuk - bentuk lapak berjalan; Menggunakan lapak bersifat *Portable* (Lapak dapat berpindah-pindah); Kurangnya pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan pedagang kaki lima; Kurang memperhatikan kebersihan.

Kesalahan umum dalam perencanaan pembangunan tata ruang kota adalah kurangnya upaya untuk menyediakan ruang terintegrasi yang memadai untuk pertumbuhan pedagang kaki lima. Perencana seringkali hanya berfokus pada penyediaan ruang untuk kegiatan dan acara formal. Ketersediaan ruang untuk kegiatan dan acara informal seringkali diabaikan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang komprehensif untuk menata dan mengelola keberadaan PKL tersebut. Rencana struktural yang khusus ditujukan untuk mendukung pengembangan Kota Jakarta Barat adalah keinginan untuk mengembangkan bisnis PKL ke arah yang benar dan baik melalui

integrasi aktif dan sinergi dengan sektor pembangunan lainnya. Harus bisa menampung kecamatan Kembangan.

Tujuan

Tujuan Studi ini melakukan kajian terhadap dampak lingkungan PKL di kawasan Kembangan dan sekitarnya, mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh Perda DKI terhadap PKL lokal, dan mengidentifikasi alternatif solusi dan kebijakan bagi PKL di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi proposal. Perancangan arsitektur untuk meningkatkan kualitas ruang kota di Jakarta. Menilai dampak lingkungan dari pedagang kaki lima di dalam dan sekitar kawasan Kembangan; Evaluasi terhadap pedoman yang diterapkan Perda DKI terhadap pedagang kaki lima di sekitar kawasan Kembangan; Memberikan solusi/saran alternatif berupa desain arsitektur untuk meningkatkan kualitas tata ruang Kota Jakarta.

2. KAJIAN LITERATUR

Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang menjajakan barangnya di pinggir jalan atau di tempat umum. Selain itu, PKL (disingkat PKL) sering diartikan sebagai pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak. Istilah ini sering dipahami sebagai pedagang yang terdiri dari lima kakinya. Lima kakinya adalah jumlah dari dua kakinya pedagang dan tiga "kaki" gerobaknya (sebenarnya, tiga roda, atau dua roda dan satu kakinya). tersedia). Istilah PKL kini juga digunakan sebagai istilah umum bagi PKL. Secara etimologi dan bahasa, pedagang umumnya diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah seseorang yang membeli komoditas dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang kaki lima adalah pertukaran permanen atau non-permanen. Pedagang kaki lima dapat dipahami sebagai pedagang yang tidak memiliki tempat usaha tetap atau berdagang menetap. (David Cardona, Associated Press, dan SOS, hal. 2020:32-33).

Sejarah Pedagang Kaki Lima di Indonesia

Menurut Handro Tanuwijaya, istilah pedagang kaki lima berasal dari masa penjajahan Belanda. Tepatnya saat Gubernur Stamford Raffles berkuasa (1811-1816). Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda memberlakukan peraturan bahwa semua jalan yang dibangun harus memiliki trotoar yang disebut trotoar. Lebar trotoar ini adalah 5 kaki (*feet*), faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya PKL di kota-kota besar Indonesia dikarenakan keterbatasan kesempatan kerja dan meningkatnya pengangguran akibat minimnya lapangan pekerjaan memaksa mereka menjadi pedagang kaki lima (apalagi, pekerjaan sektor formal, seperti instansi pemerintah, tidak membutuhkan modal besar, pendidikan tinggi, atau korporasi); Kesulitan keuangan Krisis ekonomi tahun 1998 melemahkan sektor formal, menyebabkan PHK besar-besaran dan memaksa outsourcing ke sektor informal); Peluang selain terbatasnya kesempatan kerja dan krisis ekonomi tahun 1998, munculnya pedagang kaki lima juga membawa peluang besar (di sisi lain, perilaku masyarakat yang membelanjakan uang secara bebas juga menjadi alasan mengapa mereka menjawab kebutuhan lokal dengan menjadi pedagang kaki lima); Urbanisasi, perpindahan penduduk yang cepat dari desa ke kota (akibatnya, tenaga kerja akan ditarik tidak hanya untuk berpenghasilan tinggi, tetapi juga penduduk perkotaan berpenghasilan menengah dan bahkan rendah. Hal ini meningkatkan permintaan akan barang dan jasa yang relatif murah).

Pedagang kaki lima biasanya menempati lokasi-lokasi yang selalu dianggap menguntungkan, seperti pusat kota, kawasan ramai, dan tempat wisata potensial. Pedagang kaki lima terutama di kawasan wisata sangat dekat dengan wisatawan dan masyarakat umum. Hal ini karena PKL lebih mudah ditemukan daripada dealer resmi yang berjualan di lokasi tetap. Hal ini memudahkan wisatawan dan masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhannya berupa

barang eceran. Oleh karena itu, pedagang kaki lima memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Penataan Pedagang Kaki Lima

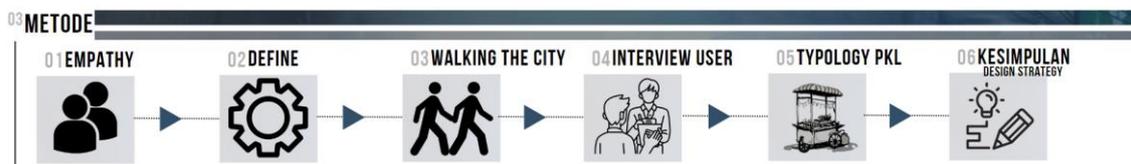
Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan, ketertiban dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata. (Badudu, Zain. 1996:132).

Kebijakan pemerintah Kabupaten Karo bekerja sama dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo dalam mengatur keberadaan PKL adalah merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai dengan peruntukannya. Upaya tersebut adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi PKL, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, pengaturan pemberian sanksi, dan upaya dalam pemberdayaan terhadap PKL. Dengan Langkah tersebut diharapkan dapat terwujud suatu kegiatan usaha PKL yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga dapat memperkecil dampak negative atas keberadaannya. Penataan lokasi usaha bagi PKL dilakukan di tempat – tempat lain, kecuali di daerah lingkungan pasar dan terminal.

3. METODE

Metode Pengumpulan Data

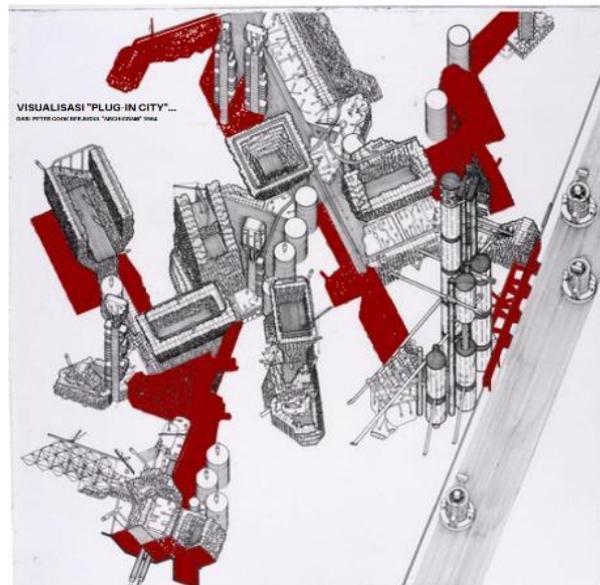
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengilustrasikan permasalahan dan memetakan permasalahan yang ada dengan mendeskripsikan data aspek empati arsitektur terkait permasalahan PKL, permasalahan lingkungan dan potensi di kawasan CBD Puri Indah. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang situasi aktual di lapangan dan untuk memperoleh informasi dan data yang lebih spesifik dan akurat.



Gambar 8. Konfigurasi Skema Alur Pengambilan Data
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023

Metode Desain

Dalam pengembangan metode desain yang diimplementasikan pada proyek desain, menggunakan pendekatan "Plug-in City" yang dikembangkan oleh arsitek Inggris, Peter Cook, dalam bukunya yang berjudul "Archigram" pada tahun 1964. Konsep ini menggambarkan sebuah kota yang dibangun berdasarkan modularitas dan fleksibilitas, sehingga memungkinkan pengembangan kota yang cepat dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Infrastruktur kota dirancang sebagai modul-modul yang dapat disambungkan dan dilepas dengan mudah. Setiap modul dapat digunakan untuk berbagai fungsi, seperti tempat tinggal, perkantoran, atau fasilitas publik, dan dapat diatur ulang sesuai kebutuhan. Konsep ini juga menekankan penggunaan teknologi canggih dan energi terbarukan.

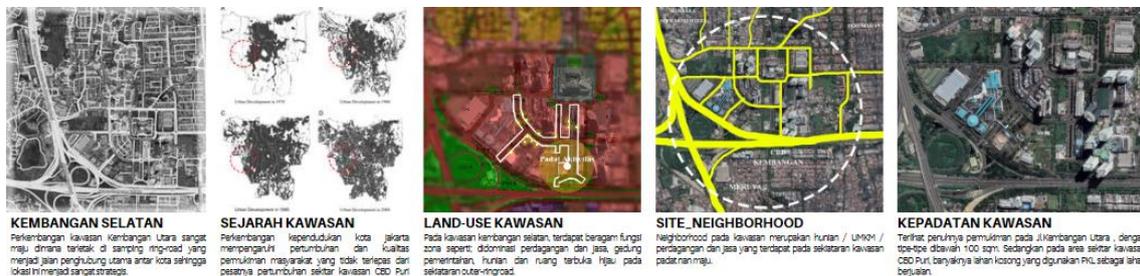


Gambar 9. Visualisasi *Plug-In City*
Sumber: Peter Cook Archigram, 1954

4. DISKUSI DAN HASIL

Lokasi Perancangan

Fenomena berdagang pedagang kaki lima yang berjamur pada kawasan *Central Business District* (CBD) Puri Indah adalah sebuah peristiwa di mana terdapat peningkatan jumlah pedagang kaki lima yang beroperasi di wilayah tersebut. CBD Puri Indah merupakan sebuah area perkantoran dan pusat perbelanjaan yang terletak di Jakarta Barat, Indonesia.

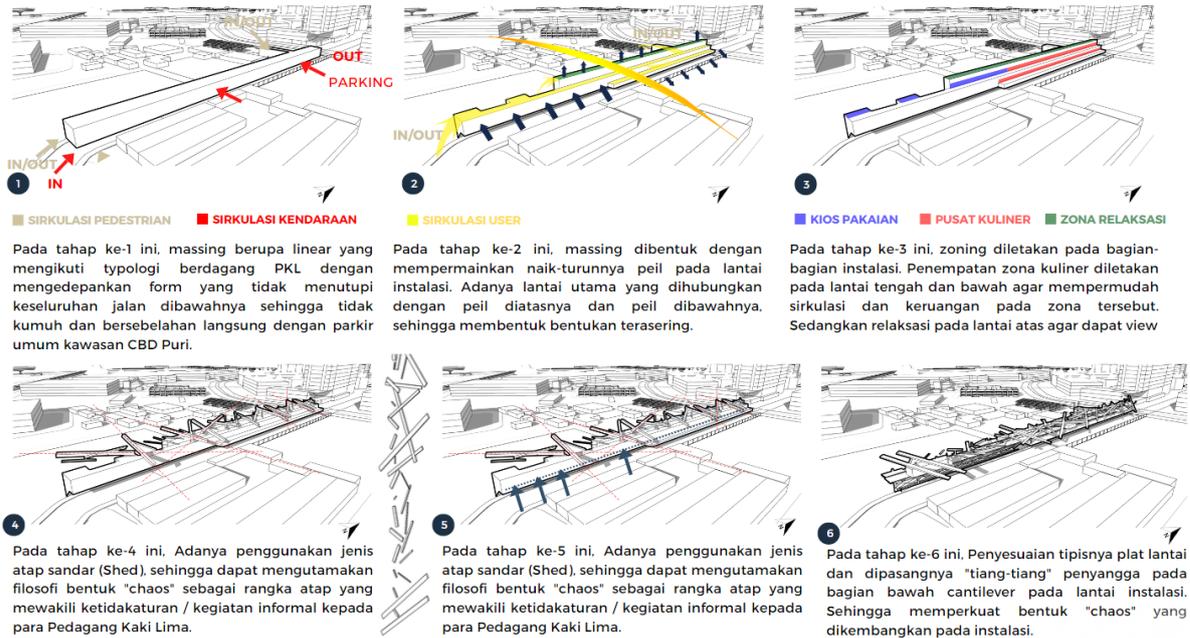


Gambar 10. Konfigurasi Pemetaan Deskripsi Lokasi Kawasan
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023

Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, CBD Puri Indah merupakan salah satu kawasan yang padat dengan aktivitas bisnis dan konsumsi. Terdapat banyak perusahaan, pusat perbelanjaan, serta kompleks perumahan di sekitar kawasan tersebut. Kondisi ini menciptakan permintaan yang tinggi untuk berbagai jenis barang dan jasa, termasuk makanan dan minuman. Kedua, pedagang kaki lima sering kali menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan restoran atau toko-toko konvensional di pusat perbelanjaan. Hal ini menjadikan mereka sebagai pilihan yang menarik bagi karyawan kantor yang ingin menikmati makanan yang murah dan cepat. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima di CBD Puri Indah juga dapat dikaitkan dengan perubahan perilaku konsumen. Beberapa orang mungkin memilih untuk membeli makanan atau barang dari pedagang kaki lima karena kemudahan dan kecepatan pelayanannya. Selain itu, ada juga konsumen yang menikmati suasana santai dan informal yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima.

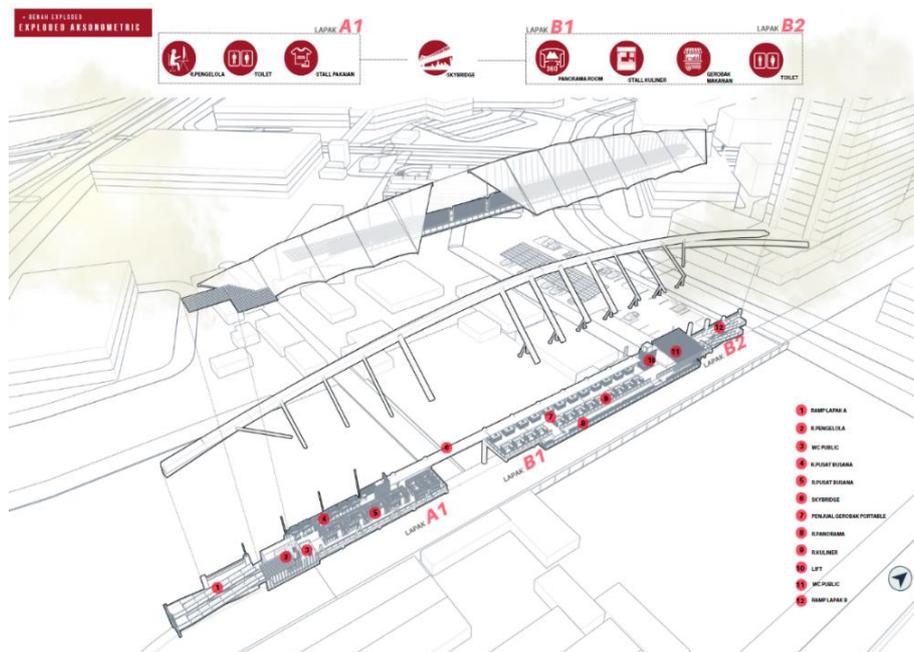
Gubahan Instalasi Keruangan

Berikut adalah mapping detail dari proses pengembangan bentuk desain bangunan:



Gambar 13. Mapping Gubahan Massan Bangunan
Sumber: Analisa Pribadi, 2023

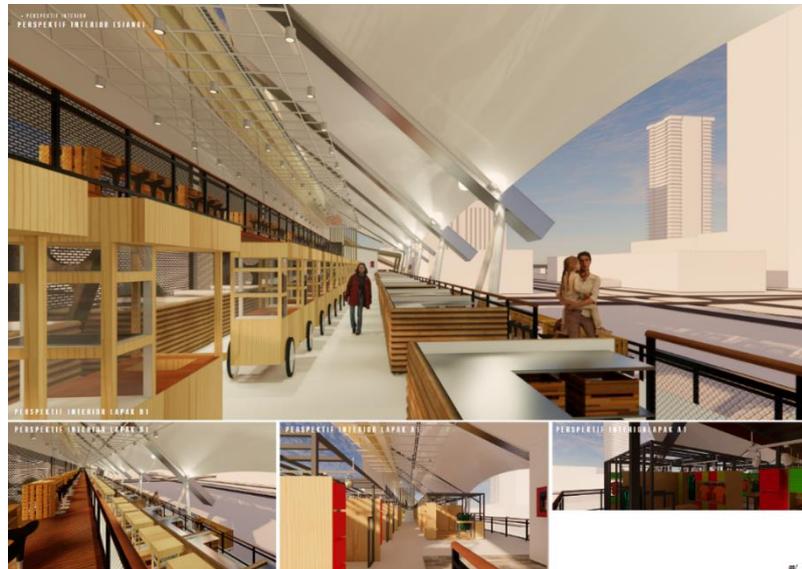
Massa instalasi terbagi dua, dimana adanya lapak yang berkonsentrasi terhadap fungsi berdagang makanan dan pakaian, lalu dihubungkan dengan adanya jembatan penyeberangan sehingga adanya konektivitas antara keduanya. Dilengkapi dengan visualisasi keterangan layout bangunan, seperti:



Gambar 14. Potongan Aksometri Bangunan
Sumber: Analisa Pribadi, 2023

Dampak Proyek Terhadap Kawasan CBD Puri Indah, Kembangan

Berdasarkan metode *plug-in city* yang digunakan dalam desain instalasi wadah arsitektur pada kawasan CBD Puri Indah untuk instalasi pedagang kaki lima, dapat disimpulkan bahwa desain ini dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima dan masyarakat sekitar.



Gambar 15. Visualisasi Lapak Dagangan
Sumber: Analisa Pribadi, 2023

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan metode *Plug-in city* yang digunakan dalam desain instalasi wadah arsitektur pada kawasan CBD Puri Indah untuk instalasi pedagang kaki lima, dapat disimpulkan bahwa desain ini dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima dan masyarakat sekitar. Dengan menggunakan pendekatan *Plug-in city*, desain instalasi wadah arsitektur ini memungkinkan untuk penempatan yang fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan permintaan dari pedagang kaki lima. Yaitu dengan adanya “aktualisasi” lapak berjualan di tengah legalitas kawasan secara melayang diatas jalan. Selain itu, desain ini juga memungkinkan untuk penghematan ruang yang efisien dan optimal dalam kawasan yang padat seperti CBD Puri Indah.

Dalam jangka panjang, desain instalasi wadah arsitektur ini dapat memberikan dampak positif pada kawasan CBD Puri Indah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan memberikan akses yang lebih mudah ke pedagang kaki lima dan memberikan kesempatan bagi pedagang untuk meningkatkan pendapatan mereka. Setiap kota akan selalu memiliki permasalahan yang berbeda-beda bisa dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Begitu juga dengan CBD Puri Indah, Kembangan, selain sebagai kawasan bisnis, rekreasi, dan hunian tak dipungkiri bahwa terdapat pelaku – pelaku pedagang kaki lima dengan pandangan negative dari susunan dan tatanan kota. Kehadiran mereka yang cenderung merusak infrastruktur kawasan namun di lain sisi adanya fungsi mutualisme diantara konsumen dan pedagang yang saling membutuhkan.

Keadaan menjadi lebih buruk karena kondisi eksisting yang tak mendukung dan lingkungan yang rusak. Seperti banyak trotoar yang diambil alih pedagang, sampah berserakan, pedestrian rusak, dan tatanan bentuk kota yang rusak. Disini arsitektur mengambil peran dalam memberikan wadah yang “formal” untuk mereka para pelaku “informal” (pedagang kaki lima) dengan

menggunakan metode Plug-In City. Yang menghasilkan instalasi layang diatas jalan pada layer ke dua (Jl. Puri Molek 1). Dimana Lapak instalasi ini menghadirkan peran PKL ditengah kawasan yang sudah maju sehingga memberikan status “legal” dan memberikan kesan positif terhadap Pedagang, Konsumen, Pihak berwenang dan kaidah susunan bentuk kota. Dengan menggunakan pendekatan plug-in city, desain instalasi wadah arsitektur ini memungkinkan untuk penempatan yang fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan permintaan dari pedagang kaki lima. Selain itu, desain ini juga memungkinkan untuk penghematan ruang yang efisien dan optimalisasi dalam kawasan yang padat seperti CBD Puri Indah.

Saran

Evaluasi terus menerus

Penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap desain instalasi wadah arsitektur ini. Evaluasi dapat melibatkan survei atau wawancara dengan pedagang kaki lima dan masyarakat sekitar untuk memahami sejauh mana desain ini telah memberikan manfaat bagi mereka. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat perubahan atau perbaikan yang diperlukan dalam desain atau operasional instalasi wadah arsitektur ini.

Keterlibatan komunitas

Melibatkan komunitas pedagang kaki lima dan masyarakat sekitar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait desain ini sangat penting. Dalam diskusi terbuka, dapat dilakukan pertukaran ide dan masukan dari semua pihak terkait. Komunitas dapat memberikan wawasan berharga tentang kebutuhan dan harapan mereka, sehingga desain dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya.

Pelatihan dan pengembangan keterampilan

Selain menyediakan infrastruktur yang baik, perlu dilakukan upaya untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pedagang kaki lima. Pelatihan ini dapat mencakup aspek seperti manajemen usaha, pemasaran, kebersihan, dan keterampilan komunikasi. Dengan meningkatkan keterampilan pedagang, mereka dapat meningkatkan kualitas produk dan pelayanan mereka, sehingga meningkatkan daya saing dan pendapatan mereka.

Pengelolaan yang baik

Penting untuk memiliki sistem pengelolaan yang baik untuk memastikan operasional instalasi wadah arsitektur berjalan dengan lancar. Ini mencakup penetapan standar operasional, pemeliharaan rutin, pengaturan keamanan, dan penyelesaian konflik potensial. Dengan adanya manajemen yang baik, dapat dijaga keberlanjutan dan kesuksesan desain ini dalam jangka panjang.

Kolaborasi dengan pihak terkait

Untuk memaksimalkan manfaat desain ini, penting untuk menjalin kolaborasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini dapat melibatkan kerjasama dalam hal pembiayaan, bantuan teknis, atau advokasi kebijakan. Dengan kolaborasi yang kuat, dapat diperoleh dukungan dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk melaksanakan dan mengembangkan desain instalasi wadah arsitektur ini.

REFERENSI

- Badudu, Zein. (1996). *Kamus Bahasa Indonesia* (hal. 132). Sinar Harapan.
- David Cardona, A. P., & Sos, S. (2020). *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki lima*. Scopindo Media Pustaka.
- Cook, P. (1964). *Plug-in City*. Dalam Archigram (hal. 26-29). London: Archigram.
- Desjardins, M 1998, *How to succeed in postgraduate study*, Applied Ecology Research Group, University of Canberra, diunduh 26 April 2001, <<http://aerg.canberra.edu.au/jardins/t.htm>>. (Disarikan dari berbagai sumber).
- Tanuwijaya, H. (2011). *Bisnis Pedagang Kaki Lima [Five-foot Way Business]* (hal. 15). PT. Pustaka Pelajar.